



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
JL.HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B NO.11 KEL. BATULAPPA
KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT., Karena atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 dapat terselesaikan.

Terbitnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan dan langkah awal dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk terbitnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi serta sumbangsuhnya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2018


KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
WAHYUDDIN, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590327 198603 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... | 5 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD | 5 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 15 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 24 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 24 |
| 2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 36 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... | 42 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 42 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 42 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 43 |
| BAB IV P E N U T U P..... | 51 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|---------|--|---------|
| Tabel 1 | Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan s/d Tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang | 8 |
| Tabel 2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Tahun 2016... | 18 |
| Tabel 3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang..... | 26 |
| Tabel 4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019..... | 37 |
| Tabel 5 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang..... | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perdagangan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja agar tetap berada pada koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Sedangkan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur dan sebagai dasar dalam penyusunan program/kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2019 serta RKA 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Renja Dinas Perdagangan Tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I P E N D A H U L U A N

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (Tahun 2017) dan capaian Renstra SKPD (Tahun 2018)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Perdagangan merupakan instansi yang terbentuk dari pemisahan/penggabungan antara instansi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2016. Sehingga dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2019 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah. Adapun program dan kegiatannya disesuaikan dengan bidang urusan yang menyangkut urusan yang ada pada Dinas Perdagangan (urusan perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar), sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian (2014-2018) :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - k. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
- 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD keuangan
- 5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
- 6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
 - b. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
 - c. Operasi pasar
 - d. Pembangunan pasar
 - e. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri lainnya
- 7. Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - a. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
 - b. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil menengah dengan swasta
 - c. Penyediaan sarana informasi industri kecil menengah
 - d. Pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah
- 8. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
 - a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
 - b. Pelatihan keterampilan teknologi industri kecil kerajinan
 - c. Koordinasi pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah
 - d. Peningkatan kemampuan teknologi industri
- 9. Program penataan struktur industri
 - a. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
 - b. Penyediaan sarana informasi IKM
- 10. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
 - a. Pengadaan/penyediaan lahan kawasan industri
 - b. Pembangunan kawasan industri kecil menengah

- Renstra Dinas Pendapatan Daerah (2014-2018) :
 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD keuangan
 - a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Adapun keberhasilan suatu proses perencanaan akan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, bahan evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Perdagangan s.d Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERAKNGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : Dinas Perdagangan

Lembar 1 dari 7 Halaman

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2017 | | | Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018) (Target APBD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan 2018 | | Catatan |
|-----------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|--|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2017 | Realisasi Renja SKPD tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
| 3.06.01. | Dinas Perdagangan | | | | | | | | | | |
| 3.06.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | |
| 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dokumen bermaterai | 1000 Lembar | 600 Lembar | 200 Lembar | 200 Lembar | 100 | 200 Lembar | 1.000 Lembar | 100 | |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60 Bulan | 36 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 60 Bulan | 100 | |
| 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 60 Bulan | 36 Bulan | 12 Bulan | 0 Bulan | 0 | 12 Bulan | 48 Bulan | 80 | |
| 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | 5 Bulan | 3 Bulan | 1 Bulan | 1 Bulan | 100 | 1 Bulan | 5 Bulan | 100 | |
| 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | 74 Unit | 40 Unit | 17 Unit | 5 Unit | 29,412 | 17 Unit | 62 Unit | 84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
|----------|--|--|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|-----------|----|
| 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | 60 Bulan | 36 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 60 Bulan | 100 | |
| 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Waktu peyediaan jasa kebersihan kantor | 60 Bulan | 36 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 60 Bulan | 100 | |
| 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja | Jumlah dan jenis peralatan peralatan kerja yang diperbaiki | 140 unit | 33 unit | 49 unit | 0 unit | 0 | 28 unit | 61 unit | 44 | |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 200 Buah | 120 Buah | 40 Buah | 40 Buah | 100 | 40 Buah | 200 Buah | 100 | |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1000 Eks. | 400 Eks. | 200 Eks. | 0 Eks. | 0 | 200 Eks. | 600 Eks. | 60 | |
| 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 150 Kali | 90 Kali | 30 kali | 12 kali | 40 | 30 Kali | 132 Kali | 88 | |
| 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 250 Kali | 150 Kali | 50 kali | 12 kali | 24 | 50 Kali | 212 Bulan | 85 | |
| 20 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 60 Bulan | 36 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 60 Bulan | 100 | |
| 3.06.02. | Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | |
| 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Unit | 100 | |
| 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor | 6 Unit | 4 Unit | 2 | 0 | 0 | 5 Unit | 9 Unit | 150 | |
| 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor | 2 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | 5 Unit | 5 Unit | 250 | |
| 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | 5 Unit | 3 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 5 Unit | 100 | |
| 23 | Pemeliharaan Rutin /berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala | 5 unit | 3 unit | 1 unit | 1 unit | 100 | 1 unit | 5 unit | 100 | |
| 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | 64 unit | 20 unit | 17 unit | 0 unit | 0 | 17 unit | 37 unit | 58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
|----------|---|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|----|
| 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | 120 unit | 59 unit | 24 unit | 0 unit | 0 | 24 unit | 83 unit | 69 | |
| 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala | 75 unit | 0 | 25 unit | 0 | 0 | 25 unit | 25 unit | 33 | |
| 3.06.05. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | | | | | | | | |
| 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | 9 Orang | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 Orang | 2 Orang | 0 | |
| 3.06.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | |
| 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 30 Laporan | 17 Laporan | 6 Laporan | 8 Laporan | 133,33 | 6 Laporan | 31 Laporan | 103 | |
| 02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran | 10 Laporan | 6 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 2 Laporan | 10 Laporan | 100 | |
| 3.06.15. | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Terwujudnya Perlindungan konsumen | | | | | | | | | |
| 03 | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTPP | 34769 Buah | 15257 Buah | 7120 Buah | 1569 Buah | 22 | 7285 Buah | 24.111 Buah | 69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
|----------|---|--|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|------------|-----------|------------|
| 3.06.18. | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Terciptanya efisiensi perdagangan dalam negeri | | | | | | | | | |
| 02 | Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha | Terlaksananya Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha | 4400 Buah | 2066 Buah | 920 Buah | 393 Buah | 42,717 | 960 Buah | 3.419 Buah | 78 | |
| 06 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Terwujudnya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 260 Kali | 151 Kali | 52 Kali | 52 Kali | 100 | 52 Kali | 255 Kali | 98 | |
| 08 | Operasi Pasar | Terwujudnya Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau | 65 Kali | 37 Kali | 13 Kali | 0 Kali | 0 | 13 Kali | 50 Kali | 77 | |
| 09 | Pembangunan Pasar | Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik Produsen maupun konsumen dalam melakukan transaksi bisnis | 3 Unit | 3 Unit | 5 Unit | 3 Unit | 60 | 5 Unit | 11 Unit | 367 | (APBD/DAK) |
| 11 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri | Terwujudnya Masyarakat Mengenal Produk Dalam Negeri | 13 Kali | 13 Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 Kali | 100 | |

| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8=(7/6)</i> | <i>9</i> | <i>10=(5+7+9)</i> | <i>11=(10/4)</i> | <i>12</i> |
|----------|---|---|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------------|------------|
| 4.04.17. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tercapainya target PAD (Pajak dan Retribusi Pasar) | | | | | | | | | |
| 19 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | Terlaksananya pemungutan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) | 34 Miliar | 18 Miliar | 7.200 Miliar | 6.033 Miliar | 83,792 | 7,5 Miliar | 6.059 Miliar | 17.819 | (APBD/DAK) |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Secara kelembagaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan SKPD, maka dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis Lingkungan Strategis yaitu Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diembang oleh lembaga Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD, memerlukan :

2.1.1. Lingkungan Strategis

Pengertian Lingkungan Strategis adalah faktor yang dapat membawa pengaruh terhadap Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Organisasi khususnya Dinas Perdagangan. Lingkungan Strategis dibagi dua yaitu Instrumental Input dan Emviromental Input. Instrumental Input berkenaan dengan instrument yang berpengaruh langsung secara internal dan dapat berupa kelemahan yang perlu diberikan solusi yang tepat sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Enveromental Input berkaitan dengan kebijakan atau Political Will dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah melainkan disiasati apabila berbentuk ancaman. Demikian pula dengan lingkungan strategis dianalisis berdasarkan instrumental serta emviromental input.

2.1.2. Analisa Lingkungan Internal

Lingkungan Internal merupakan Variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kinerja pada Unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam batas-batas tertentu diupayakan secara maksimal sehingga mampu dikendalikan dalam optimalisasi pencapaian kinerja dan tentunya untuk mewujudkan visi dan misi Satuan Kerja Dinas Perdagangan.

Selain itu, tersedianya Sumber Daya Manusia/Aparatur serta Sumber Daya Material berupa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Satuan Kerja Dinas Perdagangan saat ini meskipun masih jauh dari memadai, namun tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan dukungan dan motivasi kerja aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perdagangan.

2.1.3. Analisa Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Variabel yang turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja aparatur, akan tetapi pengelolaan atau pengendaliannya diluar kendali Unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan.

Jika faktor lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh atau berdampak negatif terhadap optimalisasi pencapaian kinerja aparatur maka harus dapat disiasati dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan kinerja unit Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan bagian bentuk Peraturan Perundang-undangan yang secara eksternal memiliki pengaruh signifikan serta membawa dampak yang luas terhadap penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Perdagangan, khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan cara menyikapi desentralisasi kewenangan dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam hal pembinaan dan pengembangan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pengelolaan Pasar serta

hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal Pembangunan.

Secara umum analisa kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Lembar 1 dari 6 halaman

| No. | Indikator | SPM/ | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | Standar Nasional | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Cakupan layanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah dokumen bermaterai | | | | 206 lembar | 206 | 206 | | 160 | 190 | 200 | |
| 2 | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 12 bulan | 12 | 12 | | 12 | 12 | 12 | |
| 3 | Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 12 unit | 12 | 12 | | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | | | | 1 unit | 3 | 4 | | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | | | | 20 unit | 20 | 24 | | 9 | 20 | 20 | |
| 6 | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | | | | 12 bulan | 12 | 12 | | 12 | 12 | 12 | |
| 7 | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | | | | 169 buah | 169 | 12 | | 169 | 12 | 12 | |
| 8 | Jumlah dan jenis peralatan peralatan kerja yang diperbaiki | | | | 14 unit | 14 | 7 | | | 14 | 7 | |
| 9 | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | | | | 49 item | 49 | 49 | | 49 | 49 | 49 | |
| 10 | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | - eks. | 200 | 200 | | - | - | 200 | |
| 11 | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 30 kali | 50 | 60 | | 30 | 50 | 60 | |
| 12 | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | | | | 50 kali | 50 | 60 | | 50 | 50 | 60 | |
| 13 | Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 12 bulan | 12 | 12 | | 12 | 12 | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|---|---|-----------|----------------|--------------|---|-----|----------------|--------------|----|
| | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | |
| 14 | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor | | | | | | | | | | | |
| 15 | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | | | | 1 unit | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala | | | | 1 unit | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | | | | 1unit | 1 | 3 | | 1 | 3 | 3 | |
| | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | | |
| 18 | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | 6 dokumen | 7 | 7 | | 6 | 7 | 7 | |
| | Terwujudnya Perlindungan konsumen | | | | | | | | | | | |
| 19 | Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP | | | | 100% | 4000 Alat UTTP | 3000 | | 163 | 2000 | 3000 | |
| 20 | Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolagian | | | | | 4000 Alat UTTP | | | | 4000 Alat UTTP | | |
| 21 | Sidang tera/ tera ulang alat UTTP | | | | | 4000 Alat UTTP | | | | 4000 Alat UTTP | | |
| 22 | Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur | | | | | 2 pasar | | | | 2 pasar | | |
| | Prosentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal | | | | | | | | | | | |
| 23 | Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal | | | | | | 40 kelompok | | | | 40 kelompok | |
| 24 | Cakupan intensitas pengawasan barang dan jasa perdagangan | | | | | | 2 komoditi | | | | 2 komoditi | |
| 25 | Laporan perkembangan harga kebutuhan pokok | | | | | | 11 kecamatan | | | | 11 kecamatan | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------------------|-----|-----|--|-------|-----|----|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | Terciptanya efisiensi perdagangan dalam negeri | | | | | | | | | | |
| 26 | Terlaksananya Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha | | | | | 80 | | | 80 | 80 | |
| 27 | Terwujudnya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | | | 200 pelaku usaha | 200 | 52 | | 200 | 200 | 52 | |
| 28 | Terwujudnya masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau | | | 80136 paket | | 0 | | 136 | | 0 | |
| 29 | Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat yang memberikan kenyamanan baik produsen maupun konsumen dalam melakukan transaksi bisnis | | | 5 unit | 2 | 3 | | 5 | 2 | 3 | |
| | Meningkatnya Jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan, Meningkatnya kerjasama antar IKM dengan swasta, terpenuhinya kebutuhan informasi yang dapat diakses masyarakat /pemangku kepentingan, terwujudnya pembinaan dalam rangka pengembangan IKM | | | | | | | | | | |
| 30 | Tersedianya sarana informasi industri kecil menengah | | | 11 kecamatan | 11 | 1 | | 11 | 11 | 1 | Untuk mempercepat informasi/data industri kecil menengah |
| 31 | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah | | | 100 persen | 100 | 100 | | 90,79 | 100 | - | Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------|----------------|----------------|---|---|----------------|----------------|---|
| 32 | Tersedianya pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil menengah | | | | | 25 Org/ IKM | 25 Org/ IKM | | - | 25 Org/ IKM | 25 Org/ IKM | Untuk peningkatan pengetahuan bagi industri kecil dan menengah dibidang perbankan |
| 33 | Terwujudnya pelatihan keterampilan industri kecil kerajinan | | | | | 100 persen | 75 orang | | - | 100 persen | 75 Orang | |
| | Meningkatnya keterampilan ibu-ibu Rumah Tangga & pengrajin IKM,Pening. kemampuan teknologi bagi pengrajin/ibu Rumah Tangga/IKM,Pening. koordinasi antar Instansi terkait di Tk. Kab. & IKM,Pening. kemampuan anggota KUB/Koperasi utk pembuatan POC,Penyusunan Dok.UKL-UPL | | | | | | | | | | | |
| 34 | Terwujudnya Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri | | | | 100% | 100% | - | - | | 100% | - | Untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri bagi pengusaha/pengrajin |
| | Porsentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri | | | | | | | | | | | |
| 35 | Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM | | | | - | | 25 IKM | | - | - | 25 IKM | |
| 36 | Terlaksananya pelatihan teknologi industri | | | | | | 30 orang | | | | 30 orang | |
| 37 | Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan | | | | | | 1 laporan | | | | 1 laporan | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|---|
| 38 | Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award | | | | | | 3 X pameran | | | | 3 X pameran | |
| 39 | Tersedianya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri | | | | | | 100% | | | | 100% | |
| 40 | Telaksananya pembinaan dan pengembangan IKM | | | | | | 11 kecamatan | | | | 11 kecamatan | |
| 41 | Tersedianya dokumen road map pengembangan industri kabupaten | | | | | | 1 perda | | | | 1 perda | Melaksanakan amanat UU No. 3 Thn 2014 tentang Perindustrian |
| | Prosentase tertib niaga | | | | | | | | | | | |
| 42 | Terdata semua potensi alat UTTP | | | | | | 6 laporan | | | | 6 laporan | |
| 43 | Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar ukuran | | | | | | 3700 alat UTTP | | | | 3700 alat UTTP | |
| 44 | Terfasilitasinya pegawai berhak dalam melaksanakan pelayanan tera/ tera ulang | | | | | | 2 orang | | | | 2 orang | |
| 45 | Terkontrolnya inventarisasi sarana dan prasarana kemetrolgian | | | | | | 339 unit | | | | 339 unit | |
| 46 | Terawasinya peredaran barang dan jasa | | | | | | 3700 unit | | | | 3700 unit | |
| 47 | Terpenuhinya persyaratan dalam melaksanakan pelayanan tera/ tera ulang | | | | | | 250 unit | | | | 250 unit | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri | | | | | | | | | | | |
| 48 | Masyarakat mendapatkan barang/ produk lebih murah | | | | | | 2 unit | | | | 2 unit | |

| | Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolgian | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|
| 49 | Pembentukan unut metrologi legal | | | | | | 1 kabupaten | | | | 1 kabupaten |
| 50 | Meningkatnya pengatahuan pelaku usaha/ pemilik UTTP tentang peraturan kemetrolgian | | | | | | 200 orang | | | | 200 orang |
| 51 | Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolgian | | | | | | 171 unit | | | | 171 unit |
| 52 | Terawasinya peredaran barang dan jasa | | | | | | 3700 alat UTTP | | | | 3700 alat UTTP |
| 53 | Terampilnya SDM dalam pelayanan tera/tera ulang | | | | | | 6 orang | | | | 6 orang |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Peningkatan pelayanan kemetrolgian (tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana Kemetrolgian.
2. Perlu adanya UPTD Kemetrolgian, sebagai akibat dari adanya peralihan kewenangan/pengawasan tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014.
3. Peningkatan informasi perdagangan.
4. Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerima retribusi pasar yang optimal
5. Penyediaan dan perbaikan sarana distribusi berupa bangunan dan fasilitas pasar rakyat yang memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang matang dan tentunya bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sistem Perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan di Indoneia dikenal dengan adanya Perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) artinya memungkinkan menggali ide-ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Sistem perencanaan dengan metode tersebut dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Perencanaan metode dari atas kebawah (top down planning) untuk memungkinkan terjadinya perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan Keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan terjadinya proses perencanaan tersebut, maka kita membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Dinas Perdagangan

Lembar 1 dari 7 Halaman

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------|--|----------------------------------|--|------------------|--------------------|--|----------------------------------|--|----------------|---------------------|--|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Targ et Capai an | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | | 811.623.500 | Cakupan layanan administrasi perkantoran | | Cakupan layanan administrasi perkantoran | | 870.212.400 | |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dokumen bermaterai | 200 Lbr | 1.500.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dokumen bermaterai | 200 Lbr | 1.500.000 | Penyesuaian SBM |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Pangkajene Sidenreng | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 60.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Pangkajene Sidenreng | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 45.000.000 | Bertambahnya tagihan listrik/air / Penyesuaian SBM |
| c. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Pangkajene Sidenreng | Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 8.150.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Pangkajene Sidenreng | Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 3.850.000 | |
| d. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Pangkajene Sidenreng | Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | 1 unit | 5.000.000 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Pangkajene Sidenreng | Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | 3 Unit | 15.000.000 | |
| e. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | 20 Unit | 8.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | 17 Unit | 9.000.000 | Penyesuaian SBM |
| f. | Penyediaan administrasi keuangan | Pangkajene Sidenreng | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 126.600.000 | Penyediaan administrasi keuangan | Pangkajene Sidenreng | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 115.200.000 | Penyesuaian SBM |
| g. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pangkajene Sidenreng | Waktu peyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 23.500.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pangkajene Sidenreng | Waktu peyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 21.726.000 | |
| h. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan jenis peralatan peralatan kerja yang diperbaiki | 28 Unit | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan jenis peralatan peralatan kerja yang diperbaiki | 49 Unit | 3.220.000 | |
| i. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 49 Buah | 1.863.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 40 Buah | 1.788.000 | Meningkatnya penggunaan instalasi listrik/ penyesuaian SBM |
| j. | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pangkajene Sidenreng | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 200 Eks | 6.500.000 | | | | | | |
| k. | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar Kabupaten dan Luar Provinsi | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 30 Kali | 100.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar Kabupaten dan Luar Provinsi | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 50 Kali | 242.948.800 | |
| l. | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Dalam Kab. Sidrap | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 50 Kali | 12.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Dalam Kab. Sidrap | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 50 Kali | 10.500.100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---|----------------------|--|-----------|--------------------|---|----------------------|---|-----------|-------------------|---|
| m. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pangkajene Sidenreng | Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 443.510.500 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pangkajene Sidenreng | Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 400.479.500 | Penyesuaian SBM |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | | 294.742.000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | | 53.742.000 | |
| a. | Pembangunan Gedung Kantor | Pangkajene Sidenreng | Jumlah gedung kantor yang dibangun | LS | 150.000.000 | | | | | | Pengadaan Paving Blok |
| b. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor | 2 Unit | 25.000.000 | | | | | | Kurangnya Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor (pengadaan AC) |
| c. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pangkajene Sidenreng | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor | 5 Unit | 7.000.000 | | | | | | Kurangnya Peralatan Gedung Kantor (Pengadaan Printer) |
| d. | Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor | Pangkajene Sidenreng | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | 1 Unit | 30.000.000 | Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor | Pangkajene Sidenreng | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | 1 Unit | 5.000.000 | |
| e. | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | Pangkajene Sidenreng | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala | 1 Unit | 35.242.000 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | Pangkajene Sidenreng | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala | 1 Unit | 35.242.000 | |
| f. | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | Pangkajene Sidenreng | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | 17 Unit | 34.000.000 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | Pangkajene Sidenreng | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | 1 unit | 13.500.000 | |
| g. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor | Pangkajene Sidenreng | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | 24 Unit | 13.500.000 | | | | | | |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | 10.000.000 | | | | | | |
| a. | Pendidikan dan pelatihan formal | Pangkajene Sidenreng | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | 2 Orang | 10.000.000 | | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 23.310.000 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 18.545.000 | |
| a. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pangkajene Sidenreng | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6 Laporan | 16.386.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pangkajene Sidenreng | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7 Laporan | 18.545.000 | Penyesuaian SBM |
| b. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Pangkajene Sidenreng | Jumlah laporan keuangan semesteran | 2 Laporan | 6.924.000 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|---|--------------|--|-----------|--------------------|---|----------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|
| 5 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | | Terwujudnya Perlindungan konsumen | | 37.000.000 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | | Terwujudnya Perlindungan konsumen | | 1.485.694.100 | |
| a. | Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa | 11 Kec. | Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP | 2000 buah | 37.000.000 | Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa | 11 Kec. | Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP | 4000 Alat UTTP | 8.887.100 | |
| | 1. Pengadaan sarana dan prasana kemetrolgian | | | | | | | | | | |
| b. | | | | | | Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolgian | | | | 1.465.277.000 | |
| c. | | | | | | Sidang tera/ tera ulang Alat UTTP | | | | 3.450.000 | |
| d. | | | | | | Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur | | | | 8.080.000 | |
| 6 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | Terciptanya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | 262.500.000 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | Terciptanya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | 3.330.927.000 | |
| a. | Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha | 11 Kecamatan | Terlaksananya Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan Usaha | 960 buah | 30.000.000 | | | | | | |
| b. | | | | | | Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk | 11 Kecamatan | | Laporan | 20.000.000 | |
| c. | Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan | 11 Kecamatan | Terwujudnya sistem jaringan informasi perdagangan | 52 Kali | 35.000.000 | Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan | 11 Kecamatan | | 35 Buah | 27.513.000 | Penyesuaian SBM |
| d. | Operasi Pasar | 11 Kecamatan | Terwujudnya Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau | 13 Kali | 197.500.000 | | | | | | Menyesuaikan harga |
| e. | | | | | | Pembangunan pasar | Pasar Lombo dan Lise | | 35 Buah | 3.283.414.000 | DAK |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--------------|--|------------|--------------------|--|------------------------------|--|-----------|--------------------|---|
| 7. | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | | Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan, Meningkatnya kerjasama antar IKM dengan swasta, terpenuhinya kebutuhan informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan dan terwujudnya Pembinaan/koordinasi dalam rangka pengembangan IKM | | 398.719.000 | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | | Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan, Meningkatnya kerjasama antar IKM dengan swasta, terpenuhinya kebutuhan informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan dan terwujudnya Pembinaan/koordinasi dalam rangka pengembangan IKM | | 384.949.500 | |
| a. | | | | | | Pelaksanaan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | Kab. Sidrap, Provinsi, Pusat | Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award | 100% | 250.000.000 | |
| b. | Penyediaan Sarana informasi industri kecil menengah | 11 Kecamatan | Tersedianya sarana informasi industri kecil menengah | 1 Laporan | 23.719.000 | Penyediaan Sarana informasi industri kecil menengah | 11 Kecamatan | Tersedianya sarana informasi industri kecil menengah | 1 Laporan | 10.000.000 | |
| c. | Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah | 11 Kecamatan | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah | LS | 215.000.000 | | | | | | |
| c. | Pemberian Fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM | Kab. Sidrap | Tersedianya koordinasi pemberi fasilitas akses perbankan bagi IKM | 25 Org/IKM | 10.000.000 | Pemberian Fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM | Kab. Sidrap | Tersedianya koordinasi pemberi fasilitas akses perbankan bagi IKM | 100% | 10.000.000 | Untuk meningkatkan pengetahuan dan akses perbankan bagi pengusaha IKM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---|--------------|---|----------------------------------|-------------------|---|--------------|--|----------------------------------|--|--|
| d. | Pelatihan keterampilan dan teknologi industri kecil kerajinan | Kab. Sidrap | Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing | 2 Klp pengrajin (2 klp x 25 org) | 75.000.000 | Pelatihan keterampilan dan teknologi industri kecil kerajinan | Kab. Sidrap | Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing | 2 Klp pengrajin (2 klp x 25 org) | 44.460.000 | |
| e. | Koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM | 11 Kecamatan | Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM | IKM | 75.000.000 | Koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM | 11 Kecamatan | Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM | IKM | 70.489.500 | |
| 8. | Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri : | | Meningkatnya keterampilan ibu-ibu rumah tangga dan pengrajin IKM, peningkatan kemampuan teknologi bagi pengrajin/ibu rumah tangga/IKM, peningkatan koordinasi antar instansi terkait di tkt kabupaten dan IKM, serta peningkatan kemampuan anggota KUB/Koperasi untuk pembuatan POC dan penyusunan Dokumen UKL-UPL | | 84.448.000 | Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri : | | Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar | | 91.924.000 | |
| a. | Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri | Sidrap | Terwujudnya Pembinaan kemampuan teknologi industri | 60 Orang/IKM | 34.448.000 | Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri | Sidrap | Terwujudnya Pembinaan kemampuan teknologi industri | 100% | 41.924.000 | |
| | | | | | | | TTG | Pelatihan pembuatan kripik buah | 1 Kelompok (berkah) | Disesuaikan dengan kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri | Hasil musrembang 2018 |
| b. | Pelatihan keterampilan Teknologi Industri Kecil Kerajinan | Sidrap | Terwujudnya Pelatihan keterampilan Industri Kecil Kerajinan | 25 Pengrajin/ibu rumah tangga | 50.000.000 | Pelatihan keterampilan Teknologi Industri Kecil Kerajinan | Sidrap | Terwujudnya Pelatihan keterampilan Industri Kecil Kerajinan | 11 Kecamatan | 50.000.000 | |
| 9. | | | | | | Program Penataan Struktur Industri | | Tersedianya dokumen road map pengembangan industri kabupaten | | 706.600.000 | Mengakomodir peraturan UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian |
| a. | | | | | | Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri | 11 Kecamatan | Tersedianya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri | Kelompok IKM | 506.600.000 | |
| | | | | | | 1. Administrasi | | | | 15.000.000 | |
| | | | | | | 2. Barang yang diserahkan kepada masyarakat | | | 42 Kelompok | 491.600.000 | Hasil musrembang 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Pengadaan Mesin Jahit | Kelurahan Sidenreng | | 5 Kelompok | 60.000.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Mesin Jahit | Dusun I dan II Kanie | | 2 Kelompok | 33.800.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Mesin Jahit | Kelurahan Ulu Ale | | 10 Unit (1 Kelmpok) | 16.900.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Mesin Jahit Kelompok Melati | Lingkungan 1 Kel. Bangkai | | 10 Unit (1 Kelmpok) | 16.900.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan Keterampilan Tata Boga (Open Raksasa, Kompur Gas, Laminating, DLL) | Kelurahan Manisa | | 1 Paket (1 Kelompok) | 10.000.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Alat pertukangan Molen | Desa Dengeng-dengeng | | 2 Unit (1 Kelompok) | 39.000.000 | |
| | | | | | | Bantuan Alat Perbengkelan Lingkungan 1 | Kelurahan Sidenreng | | 5 Kelompok | 50.000.000 | |
| | | | | | | Bantuan Alat Pertukangan Lingkungan 2 Walatedong | Kelurahan Sidenreng | | 2 Kelompok | 20.000.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Mesin Abon Dusun I, II | Desa Salobukkang | | 2 Unit (2 kelompok) | 15.000.000 | |
| | | | | | | Bantuan Alat Pertukangan Kayu Dusun I, II | Desa Polewali | | 4 Kelompok | 40.000.000 | |
| | | | | | | Bantuan Alat Pertukangan Kayu Untuk Desan dan Kelurahan Sekecamatan Tellu Limpoe | Kec. Tellu Limpoe | | 12 Kelompok | 120.000.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Alat Tata boga | Lingkungan 1 Kel. Arawa | | 3 Kelompok | 30.000.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan IKM Perbengkelan/Las | Kelurahan Lajong | | 2 Kelompok | 30.000.000 | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan Tata Boga | Desa Betao Riase | | 1 Kelompok | 10.000.000 | |
| b. | | | | | | Penyusunan RPIK | Kab. Sidrap | Tersedianya dokumen road map pengembangan industri kabupaten | 1 Perda | 200.000.000 | |
| 10. | | | | | | Program pengembangan sentra-sentra industri potensial | | Jumlah sentra industri dengan infastruktur dan sesuai kebutuhannya | | 1.000.000.000 | Terlaksananya pembangunan sentra pande besi |
| | | | | | | a. Penyediaan lahan untuk pengembangan sentra pandai besi | Kel. Pajalele dan Kel. Massepe | Tersedianya penyediaan lahan pengembangan sentra pandai besi | 1 unit x 1 Ha | 500.000.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|---|-------------|---|------------|---|---|--------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | b. Penyediaan dokumen: | | | | | |
| | | | | | | - Pola pengembangan IKM | Kel. Pajalele dan Kel. Massepe | Tersedianya dokumen kelengkapan pembangunan sentra pande besi | Masing-masing 1 dokumen | 500.000.000 | |
| | | | | | - Site plan | | | | | | |
| | | | | | - Detail engineering design (DED/Perencanaan Fisik) | | | | | | |
| | | | | | - AMDAL/ UKL - UPL | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Tercapainya target PAD (Pajak dan Retribusi Pasar) | | 506.000.000 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Tercapainya target PAD (Pajak dan Retribusi Pasar) | | 506.000.000 | |
| | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | Kab. Sidrap | Terlaksananya pemungutan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) | 7,5 Milyar | 506.000.000 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | Kab. Sidrap | Terlaksananya pemungutan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) | 7,5 Milyar | 506.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | 2.428.342.500 | | | | | 8.448.594.000 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrembang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi SKPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan, perindustrian, dan pasar, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Adapun usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : DINAS PERDAGANGAN

Lembar 1 dari 2 Halaman

| NO. | Program Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Besaran Volume | Pagu Indikatif (Rp) | CATATAN |
|----------|--|---------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | | Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitasi dengan pihak perbankan, Meningkatnya kerjasama antar IKM dengan swasta, terpenuhinya kebutuhan informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan dan terwujudnya Pembinaan/koordinasi dalam rangka pengembangan IKM | | | |
| 1 | Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah | 11 Kecamatan | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan IKM | | 491.600.000 | |
| - | Pengadaan Peralatan Keterampilan Tata Boga (Open Raksasa, Kompor Gas, Laminating, DLL) | Kelurahan Manisa | | 1 Paket | 10.000.000 | Hasil Musrebang 2018 |
| - | Pengadaan Mesin Jahit | Kelurahan Sidenreng | | 5 Kelompok | 60.000.000 | |
| | Pengadaan Mesin Jahit | Dusun I dan II Kanie | | 2 Kelompok | 33.800.000 | |
| - | Pengadaan Mesin Jahit | Kelurahan Ulu Ale | | 10 Unit (1 Kelpmpok) | 16.900.000 | |
| - | Pengadaan Mesin Jahit Kelompok Melati | Lingkungan 1 Kel. Bangkai | | 10 Unit (1 Kelpmpok) | 16.900.000 | |
| - | Pengadaan Alat pertukangan Molen | Desa Dengeng-dengeng | | 2 Unit | 39.000.000 | |
| - | Bantuan Alat Perbengkelan Lingkungan 1 | Kelurahan Sidenreng | | 5 Kelompok | 50.000.000 | |
| - | Bantuan Alat Pertukangan Lingkungan 2 Walatedong | Kelurahan Sidenreng | | 2 Kelompok | 20.000.000 | |
| - | Pengadaan Mesin Abon Dusun I, II | Desa Salobukkang | | 2 Unit | 15.000.000 | |
| - | Bantuan Alat Pertukangan Kayu Dusun I, II | Desa Polewali | | 4 Kelompok | 40.000.000 | |
| - | Bantuan Alat Pertukangan Kayu Untuk Desan dan Kelurahan Sekecamatan Tellu Limpoe | Kec. Tellu Limpoe | | 12 Kelompok | 120.000.000 | |
| - | Pengadaan Alat Tata boga | Lingkungan 1 Kel. Arawa | | 3 Kelompok | 30.000.000 | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|---|-----------------------|
| - | Pengadaan Peralatan IKM Perbengkelan/Las | Kelurahan Lajong | | 2 Kelompok | 30.000.000 | |
| - | Pengadaan Peralatan Tata Boga | Desa Betao Riase | | 1 Kelompok | 10.000.000 | |
| - | Pelatihan Pembuatan Kripik Buah | Desa Bulucenrana | | 1 Kelompok (berkah) | Disesuaiakn dengan kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri | |
| II | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | | | |
| | Pasar | | | | 3.000.000.000 | |
| - | Pembangunan Pasar | Dusun II Desa Lombo | | 1 Unit | 1.500.000.000 | |
| - | Revitalisasi Pasar Kulo | Desa Kulo | | 1 Unit | 1.500.000.000 | |
| III. | Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri | | | | | |
| | | | | | Meningkatnya keterampilan ibu-ibu rumah tangga dan pengrajin IKM, peningkatan kemampuan teknologi bagi pengrajin/ibu rumah tangga/IKM, peningkatan koordinasi antar instansi terkait di tkt kabupaten dan IKM, serta peningkatan kemampuan anggota KUB/Koperasi untuk pembuatan POC dan penyusunan Dokumen UKL-UPL | |
| 1 | Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri | | | Terwujudnya Pembinaan kemampuan teknologi industri | 15.000.000 | |
| - | Pelatihan dan Pengadaan Alat Pengelolaan Gula Merah | Dusun Cenrana Desa Cenrana Kec. Panca Lautang | | 1 Kelompok (Kelompok Harapan) | 15.000.000 | Hasil Musrembang 2018 |
| | | | | JUMLAH | 3.506.600.000 | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Dinas Perdagangan terbagi 3 bagian antara lain Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Pasar yang merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah, bersama-sama dengan urusan bidang infrastruktur lainnya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian Negara Kepulauan Republik Indonesia.

Pembangunan Nasional Lima Tahun (Jangka Menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan, yaitu APBN Awal dan APBN Perubahan. Dalam setiap penetapan APBN telah tertuang didalamnya berbagai Program lintas sektoral. Program Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah mengalokasikan sarana. Untuk Program Kementerian Perdagangan mengalokasikan dana Pembangunan Pasar Tradisional yang alokasi dananya dari DAK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Renja Dinas Perdagangan berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 – 2019 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Bupati untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur sebagai wujud pelaksanaan perencanaan.

a. Tujuan Renja Dinas Perdagangan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peranan industri dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing dipasar global.
- 2) Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengawasan barang/jasa dan pengembangan ekspor.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman.
- 4) Meningkatkan pelayanan administrasi.

b. Sasaran Renja Dinas Perdagangan sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan berbagai jenis usaha industri, penyerapan tenaga kerja dan investasi dibidang Industri.
- 2) Berkembangnya industri kecil, menengah dan industri rumah tangga.
- 3) Meningkatnya volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa.
- 4) Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman.
- 5) Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar.
- 6) Terpenuhinya operasional administrasi kepegawaian dan sarana dan prasarana aparatur.

3.3 Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan strategis Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- f. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- g. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- h. Penyediaan jasa perbaikan kerja
- i. Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- m. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan :
- a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD keuangan
Kegiatan :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD keuangan
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Kegiatan :
- a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Kegiatan :
- a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
 - b. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
 - c. Operasi pasar
 - d. Pembangunan pasar
7. Program pengembangan industri kecil dan menengah
Kegiatan :
- a. Penyediaan sarana informasi industri kecil menengah
 - b. Pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah
8. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Kegiatan :
- a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
 - b. Pelatihan keterampilan teknologi industri kecil kerajinan
9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan :

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 5

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

SKPD : DINAS PERDAGANGAN

Lembar 1 dari 5 halaman

| Kode | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2019 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 | |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.06.01. | Dinas Perdagangan | | | | | | | | |
| 3.06.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran | | | 870.212.400 | | | | 879.485.000 |
| 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dokumen bermaterai | Pangkajene Sidenreng | 206 Lbr | 1.500.000 | APBD II | | 12 Bulan | 1.500.000 |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 45.000.000 | APBD II | | 12 Bulan | 60.000.000 |
| 03 | Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor | Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 3.850.000 | APBD II | | 32 Unit | 3.850.000 |
| 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Pangkajene Sidenreng | 3 Unit | 15.000.000 | APBD II | | 4 Unit | 20.000.000 |
| 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Pangkajene Sidenreng | 20 Unit | 9.000.000 | APBD II | | 24 Unit | 11.200.000 |
| 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 115.200.000 | APBD II | | 12 Bulan | 105.679.000 |
| 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Pangkajene Sidenreng | 169 Buah | 21.726.000 | APBD II | | 12 Bulan | 22.175.000 |
| 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja | Jumlah dan jenis peralatan/peralatan kerja yang diperbaiki | Pangkajene Sidenreng | 28 Unit | 3.220.000 | APBD II | | 7 Unit | 11.450.000 |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Pangkajene Sidenreng | 40 Buah | 1.788.000 | APBD II | | 12 Bulan | 4.488.000 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pangkajene Sidenreng | 200 Eks | | APBD II | | 12 Bulan | 6.000.000 |
| 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar Kabupaten dan Luar Provinsi | 50 Kali | 242.948.800 | APBD II | | 12 Bulan | 261.340.000 |
| 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Dalam Kab. Sidrap | 50 Kali | 10.500.100 | APBD II | | 12 Bulan | 6.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|---|--|----------------------|----------------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|
| 20 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 400.479.500 | APBD II | | 12 Bulan | 365.803.000 |
| 3.06.02. | Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | | | 53.742.000 | | | | 91.242.000 |
| 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Pangkajene Sidenreng | LS | | APBD II | | - | - |
| 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor | Pangkajene Sidenreng | 5 Unit | | APBD II | | 6 unit | 36.000.000 |
| 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor | Pangkajene Sidenreng | 5 Unit | | APBD II | | - | - |
| 22 | Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | Pangkajene Sidenreng | 1 Unit | 5.000.000 | APBD II | | 1 Unit | 5.000.000 |
| 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala | Pangkajene Sidenreng | 1 Unit | 35.242.000 | APBD II | | 1 Unit | 35.242.000 |
| 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | Pangkajene Sidenreng | 1 Unit | 13.500.000 | APBD II | | 19 Unit | 15.000.000 |
| 3.06.05. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | | - | | | | 10.000.000 |
| 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | | | | APBD II | | 2 Orang | 10.000.000 |
| 3.06.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | 18.545.000 | | | | 30.185.000 |
| 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Pangkajene Sidenreng | 7 Laporan | 18.545.000 | APBD II | Pangkajene Sidenreng | 7 Laporan | 23.261.000 |
| 02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran | | | | APBD II | Pangkajene Sidenreng | 2 Laporan | 6.924.000 |
| 3.06.15. | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Terwujudnya Perlindungan konsumen | | | 1.485.694.100 | | | | 1.200.000.000 |
| 03 | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP | 11 kecamatan | 4000 Alat UTTP | 8.887.100 | APBD II | Kab. Sidrap | 3000 buah | 1.200.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|--|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|---|----------------------------------|--------------------|
| | Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolagian | Terlaksananya pelayanan tera/ tera ulang | 11 k'ecamatan | 4000 Alat UTTP | 1.465.277.000 | DAK | | | |
| | Sidang tera/ tera ulang alat UTTP | Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang | 11 kecamatan | 4000 Alat UTTP | 3.450.000 | APBD II | | | |
| | Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur | Jumlah pasar tertib ukur/ daerah tertib ukur | Pasar amparita & bilokka | 2 pasar | 8.080.000 | APBD II | | | |
| 3.06.18. | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Terciptanya efisiensi perdagangan dalam negeri | | | 3.330.927.000 | | | | 90.000.000 |
| | Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk | Masyarakat mendapatkan barang/ produk lebih mudah | 11 Kecamatan | laporan | 20.000.000 | | | | |
| 06 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Terwujudnya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 11 Kecamatan | 52 kali | 27.513.000 | APBD II | | 52 Kali | 90.000.000 |
| 09 | Pembangunan Pasar | Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik Produsen maupun konsumen dalam melakukan transaksi bisnis | Pasar lombo dan Lise | 2 Unit | 3.283.414.000 | DAK | - | - | |
| 3.07.16. | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Meningkatnya jumlah IKM yang terfasilitas dengan pihak perbankan, meningkatnya kerjasama antara IKM dengan swasta, terpenuhinya kebutuhan informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan dan terwujudna pembinaan/ koordinasi dalam rangka pengembangan IKM | | | 384.949.500 | | | | 180.000.000 |
| | Pelaksanaan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promisi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award | Kab. Sidrap, Provinsi, Pusat | 100% | 250.000.000 | | | | |
| 07 | Penyediaan sarana informasi IKM | Tersedianya sarana informasi IKM | 11 Kecamatan | 1 laporan | 10.000.000 | APBD II | | IKM | 18.000.000 |
| 09 | Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM | Tersedianya koordinasi pemberi fasilitas akses perbankan bagi IKM | Kab. Sidrap | 25 Org/IKM | 10.000.000 | APBD II | | 3 Klp pengrajin (3 klp x 25 org) | 12.000.000 |
| 10 | Pelatihan keterampilan dan teknologi industri kecil kerajinan | Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing | Kab. Sidrap | 2 Klp pengrajin (2 klp x 25 or)g | 44.460.000 | APBD II | | IKM | 75.000.000 |
| 11 | Koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM | Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM | 11 Kecamatan | IKM | 70.489.500 | APBD II | | IKM | 75.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|---|---|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--|-------------------------|----------------------|
| 3.07.17. | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar | | | 91.924.000 | | | | |
| | Pembinaan kemampuan teknologi industri | Terwujudnya pembinaan kemampuan teknologi industri | Kab. Sidrap | 60 IKM | 41.924.000 | APBD II | | | |
| | | Pelatihan keterampilan teknologi industri kecil dan kerajinan | Kab. Sidrap | 11 Kecamatan | 50.000.000 | APBD II | | | |
| 3.07.18. | Program penataan Struktur Industri | Tersedianya dokumen road map dan pengembangan industri kabupaten | | | 706.600.000 | | Mengakomodir peraturan UU No. 3 thn 2014 tentang perindustrian | | 715.000.000 |
| | Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri | Tersedianya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri | 11 Kecamatan | 42 Kelompok IKM | 506.600.000 | APBD II | | Kelompok IKM | 615.000.000 |
| | Penyusunan RPIK | Tersedianya dokumen road map pengembangan industri kabupaten | Kab. Sidrap | 1 Perda | 200.000.000 | APBD II | | 1 Perda | 100.000.000 |
| | Proram Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya | | | 1.000.000.000 | | | | 7.000.000.000 |
| | Penyediaan lahan untuk pengembangan sentra pande besi | Tersedianya penyediaan lahan pengembangan sentra pande besi | Kel. Pajalele dan Kel. Massepe | 1 unit x 1 Ha | 500.000.000 | APBD II | | 1 unit x 1 Ha | 500.000.000 |
| | Penyediaan dokumen | Tersedianya dokumen kelengkapan pembangunan sentra pande besi | Kel. Pajalele dan Kel. Massepe | 1 unit x 1 Ha | 500.000.000 | APBD II | | Masing-Masing 1 Dokumen | 500.000.000 |
| | Pembangunan sentra pande besi | Terlaksananya pembangunan sentra pande besi | Kel. Pajalele dan Kel. Massepe | | | | | 1 Unit | 5.000.000.000 |
| | Penyediaan peralatan sentra pande besi | Tersedianya peralatan sentra pande besi | Kel. Pajalele dan Kel. Massepe | | | | | 1 unit x 15 IKM | 1.000.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|---|---|-------------|------------|----------------------|---------|---|------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| 4.04.17. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tercapainya target PAD (Pajak dan Retribusi Pasar) | | | 506.000.000 | | | | 506.000.000 |
| 19 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | Terlaksananya pemungutan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) | Kab. Sidrap | 7,5 Milyar | 506.000.000 | APBD II | | 7,5 Milyar | 506.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | 8.448.594.000 | | | | 10.701.912.000 |

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja SKPD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja SKPD 2018 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dapat memberikan hasil (*outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2019 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2018

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



WAHYUDDIN, SE. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590327 198603 1 006